



MEMBANGUN LITERASI POLITIK MELALUI PENDIDIKAN UNTUK PEMILU YANG BERMARTABAT

Fauzan Ali Rasyid

UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia

**Correspondence: fauzan.ali.rasyid@uinsgd.ac.id*

Received: Maret 2023; Accepted: Mei 2023; Published: Mei 2023

Abstract

The weakness and strength of political literacy greatly influence the process and outcomes of elections. Therefore, enhancing political literacy is an obligation that needs to be improved through political education. Higher education institutions have a responsibility in enhancing political literacy to achieve dignified elections. The findings of this research indicate that higher education institutions play a central role in improving political literacy and building reputable elections, despite facing several challenges such as limited curriculum, limited resources, gender imbalances, technological challenges, and challenges related to politics and freedom of expression.

Keywords :

Political Literacy, Education, Elections

Abstrak

Lemah dan kuatnya literasi politik sangat mempengaruhi proses dan produk pemilu. Maka, peningkatan literasi politik merupakan suatu kewajiban yang harus ditingkatkan melalui Pendidikan politik. Pendidikan tinggi merupakan salah satu yang bertanggungjawab dalam meningkatkan literasi politik untuk mencapai derajat pemilu yang bermartabat. Hasil penelitian ini menunjukkan

bahwa Lembaga pendidikan tinggi memegang peran sentral dalam meningkatkan literasi politik dan membangun pemilihan umum yang bermartabat dengan beberapa tantangan yang dihadapi meliputi keterbatasan dalam kurikulum, sumber daya yang terbatas, ketidakseimbangan gender, tantangan teknologi, serta tantangan politik dan kebebasan berpendapat.

Kata Kunci:

Literasi Politik, Pendidikan, Pemilu

PENDAHULUAN

Literasi politik didefinisikan sebagai kemampuan individu untuk memahami, menganalisis, menggunakan, dan berpartisipasi secara efektif dalam proses politik. Literasi politik melibatkan pemahaman tentang sistem politik, pengetahuan tentang isu-isu politik, kemampuan untuk menganalisis informasi politik, dan keterampilan dalam berpartisipasi dalam kegiatan politik. Setidaknya ada beberapa komponen yang tercakup dalam literasi politik, meliputi : Pengetahuan tentang sistem politik: **pertama**, literasi politik melibatkan pemahaman tentang struktur pemerintahan, lembaga politik, peran partai politik, dan proses pengambilan keputusan politik di negara atau wilayah tertentu.¹ **Kedua**, pemahaman tentang isu-isu politik: Individu yang memiliki literasi politik akan memiliki pemahaman yang baik tentang isu-isu politik yang sedang dibahas dalam masyarakat, baik itu isu lokal, nasional, atau global. Ini mencakup pemahaman tentang masalah kebijakan, perdebatan politik, dan isu-isu kontroversial. **Ketiga**, kemampuan menganalisis informasi politik: Literasi politik melibatkan kemampuan untuk secara kritis menganalisis informasi politik yang diterima, termasuk mengidentifikasi sumber informasi, membedakan antara fakta dan opini, dan memahami bias politik yang mungkin ada dalam informasi tersebut. **Keempat**, kemampuan berpartisipasi dalam kegiatan politik: Literasi politik mencakup kemampuan untuk berpartisipasi dalam kegiatan politik, seperti pemilihan umum, kampanye politik, demonstrasi, atau aksi masyarakat. Ini melibatkan pemahaman tentang hak dan kewajiban warga negara serta kemampuan untuk berkontribusi dalam pembuatan keputusan politik. **Kelima**, keterampilan komunikasi politik: Literasi politik juga mencakup keterampilan komunikasi politik yang baik, seperti kemampuan untuk berdebat dengan argumen yang rasional, mendengarkan pandangan orang lain, dan berpartisipasi dalam diskusi politik yang beradab.²

¹ Zulhernanda, R., & Suyitno, I. (2019). Pendidikan Politik dan Literasi Politik sebagai Upaya Membangun Partisipasi Pemilih yang Bermartabat. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*, 6(1), 65

² Kurniawan, I. N., & Putri, Y. E. (2020). Literasi Politik dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih di Pemilihan Umum. *Jurnal Pendidikan Ilmu Sosial*, 28(2), 104

Melalui pengembangan komponen-komponen ini, individu dapat memperoleh literasi politik yang kuat, yang memungkinkan mereka untuk memahami dan berpartisipasi secara aktif dalam proses politik dengan cara yang efektif dan berarti. Peran literasi politik dalam membangun pemilu yang bermartabat sangat signifikan. Literasi politik memberikan fondasi yang kuat bagi individu untuk berpartisipasi secara aktif dan sadar dalam proses politik, termasuk pemilu. Sementara itu, pemilu merupakan salah satu proses politik yang penting dalam sistem demokrasi, termasuk Indonesia salah satunya. Pemilu merupakan singkatan dari Pemilihan Umum, yang merupakan mekanisme untuk memilih wakil rakyat dan pemimpin negara. Dalam pemilu, warga negara memiliki kesempatan untuk memberikan suara mereka dalam menentukan calon yang akan mewakili mereka di parlemen atau menjabat sebagai pemimpin negara, seperti presiden atau kepala pemerintahan. Oleh karena itu, peran dan fungsi serta pengaruh literasi politik sangat kuat dalam menentukan proses serta hasil pemilu yang berkualitas dan bermartabat. Berikut adalah beberapa alasan mengapa literasi politik penting dalam pemilu:

Pertama, memastikan partisipasi yang sadar: Literasi politik memungkinkan pemilih untuk memiliki pemahaman yang baik tentang sistem politik, proses pemilihan, dan peran mereka sebagai pemilih. Dengan pemahaman ini, pemilih dapat berpartisipasi dengan kesadaran penuh, membuat keputusan yang terinformasi, dan memilih calon yang sesuai dengan nilai-nilai dan aspirasi mereka.

Kedua, meningkatkan kualitas partisipasi: Literasi politik membantu meningkatkan kualitas partisipasi pemilih dalam pemilu. Pemilih yang memiliki literasi politik yang baik mampu menganalisis informasi politik secara kritis, memahami argumen politik yang berbeda, dan membuat keputusan yang berdasarkan pengetahuan yang baik tentang isu-isu politik yang sedang dibahas. Hal ini berkontribusi pada pemilihan calon yang lebih berkualitas dan pemahaman yang lebih baik tentang isu-isu yang relevan.

Ketiga, mengurangi pengaruh manipulasi dan propaganda: Literasi politik membantu pemilih dalam mengenali manipulasi politik, propaganda, dan penyebaran informasi yang tidak akurat atau palsu. Dengan literasi politik yang kuat, pemilih lebih cenderung menjadi kritis terhadap pesan politik yang disampaikan oleh calon atau pihak lain. Mereka dapat membedakan antara fakta dan opini, serta menganalisis argumen secara objektif.³

Keempat, mempromosikan partisipasi inklusif: Literasi politik berperan dalam mendorong partisipasi inklusif dalam pemilu. Dengan pengetahuan tentang hak dan kewajiban warga negara, pemilih dapat memastikan bahwa partisipasi mereka diakui dan dihargai tanpa diskriminasi. Literasi politik juga membantu dalam memahami pentingnya mewujudkan inklusi dalam pemilu,

³ Hahn, C., & Kaghan, W. (2017). Education for democratic citizenship: A review of research, policy, and practice, 1995-2015. 134

seperti melibatkan kelompok-kelompok minoritas atau marginal dalam proses politik.

Kelima, mendorong akuntabilitas dan transparansi: Literasi politik mendorong tuntutan akan akuntabilitas dan transparansi dalam pemilu. Pemilih yang memiliki literasi politik yang baik dapat memahami peran lembaga pengawas pemilu, LSM, dan masyarakat sipil dalam memastikan integritas pemilu. Mereka juga dapat mengawasi proses pemilihan, memantau pelanggaran, dan menuntut transparansi dalam proses pengambilan keputusan.⁴

Dengan meningkatkan literasi politik di kalangan pemilih, pemilu dapat menjadi lebih inklusif, transparan, dan mewakili kehendak rakyat. Literasi politik memainkan peran kunci dalam membangun pemilu yang bermartabat dan memperkuat demokrasi.

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian hukum normatif yang berfokus pada analisis dan pemahaman hukum dari perspektif normatif. Metode penelitian yang digunakan meliputi studi literatur untuk mengumpulkan dan menganalisis literatur yang telah ada, seperti buku, artikel, laporan penelitian, dan kebijakan terkait retensi data pemilih pemula dalam konteks perlindungan hak pilih dalam Pemilu. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan metode studi kasus untuk melakukan analisis mendalam terhadap kasus atau situasi tertentu terkait peningkatan peranan Pendidikan dalam meningkatkan literasi politik untuk mewujudkan pemilu yang bermartabat. Selanjutnya, penelitian ini juga melibatkan analisis peranan dengan memahami secara mendalam model, strategi, tantangan dan dampak Pendidikan dalam meningkatkan literasi politik.⁵

Penelitian dengan tema besar sama yang pernah dilakukan, diantaranya oleh Kurniawan, I. N., & Putri, Y. E. (2020), dengan judul "*Literasi Politik dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih di Pemilihan Umum*" pada Jurnal Pendidikan Ilmu Sosial.⁶ Penelitian ini mengkaji hubungan antara literasi politik dan partisipasi pemilih dalam pemilihan umum di Indonesia. Studi ini menyoroti pentingnya pendidikan politik untuk meningkatkan literasi politik masyarakat dan mendorong partisipasi pemilih yang bermartabat. Selanjutnya, penelitian yang dilakukan oleh Martens, A., & Wolf, K. D. (2018), dengan judul "*Political literacy and the quality of democracy: A cross-national analysis*" pada jurnal

⁴ Rasyid, Fauzan Ali. "Political will government in prevention of Post-Reform Corruption in Indonesia." *International Journal of Psychosocial Rehabilitation* 24.3 (2020): 5304-5313.

⁵ Gumilar, Setia, Fauzan Ali Rasyid, and Abas Hidayat. (2023). "Political Opposition In Islamic Political Perspective." *Russian Law Journal* 11.3s

⁶ Kurniawan, I. N., & Putri, Y. E. (2020). *Literasi Politik dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih di Pemilihan Umum*. Jurnal Pendidikan Ilmu Sosial, 28(2), 104

Political Studies.⁷ Penelitian ini menganalisis hubungan antara literasi politik dan kualitas demokrasi dalam skala lintas negara. Studi ini menunjukkan bahwa literasi politik yang tinggi berhubungan dengan peningkatan kualitas demokrasi, termasuk pemilu yang bermartabat. Literasi politik dianggap sebagai faktor penting dalam membangun partisipasi politik yang berkualitas.

Penulisan artikel ini bertujuan untuk memberikan pemahaman tentang konsep serta kepentingan literasi politik dalam pemilu, model dan peranan pendidikan dalam membangun literasi politik, strategi dan tantangan serta dampak meningkatkan literasi politik melalui pendidikan terhadap pemilihan umum. Pendidikan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah Lembaga Pendidikan tinggi atau disebut dengan universitas.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Model Dan Strategi Pendidikan Tinggi Dalam Membangun Literasi Politik

Literasi merujuk pada kemampuan individu dalam membaca, menulis, dan menghitung, yang kini telah berkembang menjadi kemampuan dalam menelusuri, mengelola, menganalisis, dan mencerna informasi yang diperoleh melalui media cetak atau digital. Literasi memiliki peran penting dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia, meningkatkan kecerdasan, daya kritis, dan kemampuan berpikir logis seseorang.

Generasi Z dan generasi Milenial memiliki peran yang signifikan dalam mencapai cita-cita "Indonesia emas 2045", yang mencakup kemajuan dalam pendidikan, ekonomi, budaya sosial, dan politik, serta kemampuan bersaing dengan negara lain. Untuk mewujudkan cita-cita tersebut, pemahaman politik dan partisipasi aktif rakyat sangat penting. Generasi Z dan Milenial menjadi penentu kualitas pemilihan umum dan politik di Indonesia, serta memiliki tanggung jawab sebagai pengawas penyelenggaraan negara.

Fakta yang mengejutkan bahwa Indonesia menduduki peringkat kedua terbawah dalam hal literasi menurut UNESCO, dengan hanya 0,001% dari populasi Indonesia yang memiliki minat membaca. Dalam penilaian "World's Most Literate Nations Ranked" oleh Central Connecticut State University, Indonesia menempati peringkat ke-60 dari 61 negara dalam hal minat membaca.

Meskipun Indonesia memiliki infrastruktur yang mendukung literasi lebih baik daripada negara-negara Eropa, minat membaca di Indonesia tetap rendah. Di sisi lain, Indonesia memiliki jumlah kepemilikan gadget yang tinggi, dengan 60 juta penduduk yang memiliki gadget dan menjadi urutan kelima di dunia. Pada tahun 2018, diperkirakan jumlah pengguna aktif smartphone di Indonesia mencapai lebih dari 100 juta orang, menjadikan Indonesia sebagai

⁷ Martens, A., & Wolf, K. D. (2018). Political literacy and the quality of democracy: A cross-national analysis. *Political Studies*, 66(2), 512-532.

negara dengan pengguna aktif smartphone terbesar keempat di dunia setelah Cina, India, dan Amerika Serikat.

Ironisnya, meskipun minat membaca buku rendah, orang Indonesia menghabiskan waktu sekitar 9 jam per hari menatap layar gadget. Hal ini tercermin dalam tingkat kecerewetan orang Indonesia di media sosial yang menempati peringkat kelima di dunia. Jakarta juga menjadi kota dengan aktivitas kicauan di Twitter yang paling padat, melebihi Tokyo dan New York, menurut riset SemioCast, sebuah lembaga independen di Paris.⁸

Kemampuan literasi yang dimaksud terdiri dari berbagai aspek, namun literasi pada aspek politik masyarakat Indonesia cenderung lemah dan kurang. Padahal, tingkat keaktifan masyarakat Indonesia pada media sosial lebih didominasi pembahasan dan persoalan seputar politik dan pemilu. Akibatnya, oleh karena pemahaman literasi politik yang kurang berdampak pada proses dan produk pemilihan umum yang kurang bermartabat, seperti beberapa kasus kontroversi yang berkaitan dengan perbedaan pilihan dalam pemilu, penggunaan isu SARA dan rasis serta banyak bermunculan benih-benih pertikaian sesama anak bangsa yang lambat laun akan menjadi bom waktu bagi perpecahan kesatuan bangsa.

Maka, lembaga pendidikan memiliki peranan dan tanggungjawab yang sangat penting untuk hadir sebagai solusi terhadap permasalahan tersebut. Lembaga pendidikan tinggi memiliki peran yang penting dalam meningkatkan literasi politik di Indonesia. Berikut adalah beberapa peran utama yang dimainkan oleh lembaga pendidikan tinggi dalam hal ini:

Pertama, Pendidikan dan Kurikulum: Lembaga pendidikan tinggi dapat merancang kurikulum yang memasukkan mata pelajaran yang relevan dengan literasi politik, seperti ilmu politik, hukum, etika, dan kepemimpinan. Dengan demikian, mahasiswa akan mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam tentang sistem politik, proses pemilu, struktur pemerintahan, dan hak-hak serta kewajiban warga negara.

Kedua, Penyediaan Informasi: Lembaga pendidikan tinggi dapat menjadi sumber informasi yang kredibel dan terpercaya mengenai politik. Dengan menyediakan akses ke literatur, jurnal, riset, dan sumber daya lainnya, lembaga pendidikan tinggi membantu mahasiswa dalam memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang isu-isu politik yang relevan dan perkembangan terkini dalam politik.

Ketiga, Pembelajaran Aktif: Melalui pendekatan pembelajaran aktif, lembaga pendidikan tinggi dapat mendorong mahasiswa untuk berpartisipasi dalam diskusi, debat, dan kegiatan politik lainnya. Dalam lingkungan yang mendukung, mahasiswa dapat mengembangkan keterampilan berpikir kritis,

⁸ Evita Devega, "Teknologi Masyarakat Indonesia: Malas Baca Tapi Cerewet di Medsos" selengkaponya di https://www.kominfo.go.id/content/detail/10862/teknologi-masyarakat-indonesia-malas-baca-tapi-cerewet-di-medsos/0/sorotan_media, diakses pada 12 Mei 2023

analisis kebijakan, dan pemahaman tentang proses politik melalui diskusi dan refleksi.

Keempat, Pengembangan Keterampilan: Lembaga pendidikan tinggi dapat membantu mahasiswa mengembangkan keterampilan yang diperlukan dalam literasi politik, seperti kemampuan analisis, pemahaman informasi politik, keterampilan berargumentasi, dan kemampuan mengambil keputusan yang informan dalam pemilu.

Kelima, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat: Lembaga pendidikan tinggi dapat melakukan penelitian yang berkaitan dengan literasi politik, termasuk studi tentang partisipasi politik, persepsi publik terhadap proses pemilu, faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi pemilih, dan efektivitas program pendidikan politik. Selain itu, lembaga pendidikan tinggi juga dapat terlibat dalam kegiatan pengabdian masyarakat, seperti menyelenggarakan pelatihan, seminar, dan program pendidikan politik bagi masyarakat umum.⁹

Dengan peran yang kuat dari lembaga pendidikan tinggi dalam meningkatkan literasi politik di Indonesia, diharapkan masyarakat dapat menjadi warga negara yang lebih aktif, sadar politik, dan berpartisipasi dalam proses pemilu dengan pemahaman yang lebih baik. Adapun beberapa model yang dapat diterapkan dalam meningkatkan literasi politik oleh Lembaga Pendidikan tinggi, diantaranya :

Pertama, Integrasi Kurikulum: Lembaga pendidikan tinggi dapat mengintegrasikan materi literasi politik ke dalam kurikulum yang ada. Ini dapat dilakukan dengan memasukkan mata pelajaran atau modul khusus yang membahas isu-isu politik, sistem politik, partisipasi politik, pemilihan umum, dan pemahaman hak dan kewajiban warga negara.

Kedua, Pengembangan Program Studi Spesifik: Lembaga pendidikan tinggi dapat mengembangkan program studi yang secara khusus fokus pada literasi politik, seperti program studi ilmu politik, studi pemerintahan, atau pendidikan kewarganegaraan. Program studi ini dapat menyediakan kurikulum yang komprehensif dan mendalam dalam mempelajari politik dan meningkatkan literasi politik mahasiswa.

Ketiga, Pendidikan Politik Aktif: Lembaga pendidikan tinggi dapat menerapkan model pendidikan politik yang aktif, yang melibatkan mahasiswa dalam kegiatan partisipatif seperti debat politik, simulasi pemilihan umum, kampanye politik, atau diskusi panel dengan praktisi politik. Pendekatan ini dapat membantu mahasiswa mengembangkan pemahaman praktis tentang proses politik dan meningkatkan keterampilan partisipasi politik mereka.

Keempat, Kolaborasi dengan Komunitas dan Institusi Politik: Lembaga pendidikan tinggi dapat menjalin kemitraan dengan komunitas lokal, partai politik, atau lembaga politik lainnya untuk menyelenggarakan program-

⁹ Kahne, J., & Westheimer, J. (2017). What kind of citizen? The politics of educating for democracy. *American Educational Research Journal*, 54(1), 9

program literasi politik bersama. Kolaborasi ini dapat mencakup workshop, seminar, atau program pelatihan yang melibatkan mahasiswa dalam interaksi langsung dengan pemangku kepentingan politik.

Kelima, Penelitian dan Pengembangan Inovasi: Lembaga pendidikan tinggi dapat melakukan penelitian dan pengembangan inovasi dalam bidang literasi politik. Ini mencakup penelitian tentang faktor-faktor yang mempengaruhi literasi politik, evaluasi program pendidikan politik, dan pengembangan metode pembelajaran yang efektif dalam meningkatkan literasi politik. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai dasar untuk mengembangkan strategi dan program yang lebih baik dalam meningkatkan literasi politik di masyarakat.

Dengan menerapkan model-model ini, lembaga pendidikan tinggi dapat berperan aktif dalam meningkatkan literasi politik di Indonesia. Melalui pendekatan yang holistik dan beragam, mahasiswa dapat mengembangkan pemahaman, keterampilan, dan kesadaran politik yang diperlukan untuk berpartisipasi secara aktif dalam proses pemilu dan kehidupan politik yang bermartabat. Sekalipun begitu, berdasarkan data pada Badan Pusat Statistik menunjukkan bahwa Angka Partisipasi Kasar pada perguruan tinggi di Indonesia sampai dengan tahun 2022 masih belum mencapai target nasional 34,56% dan cenderung tertinggal dari negara tetangga, seperti APK pendidikan tinggi di Singapura mencapai 91 persen, Thailand 49 persen, dan Malaysia 43 persen berdasarkan laporan Bank Dunia pada tahun 2020. Meskipun begitu, angka APK di Indonesia setiap tahunnya cenderung naik dan dapat dipastikan bisa mencapai target nasional serta bersaing dengan negara tetangga tersebut, selengkapanya data tersebut sebagai berikut :¹⁰

Tabel 1 APK PT di Indonesia 2018-2022

Angka Partisipasi Kasar (APK) Perguruan Tinggi (PT)				
2018	2019	2020	2021	2022
28,34	28,93	30.85	31.19	31.16

Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS) Indonesia

Berdasarkan data yang diberikan, terdapat peningkatan secara bertahap dalam Angka Partisipasi Kasar (APK) Perguruan Tinggi (PT) di Indonesia dari tahun 2018 hingga 2021. Pada tahun 2018, APK PT mencapai 28,34 persen, kemudian meningkat menjadi 28,93 persen pada tahun 2019. Pada tahun 2020, terjadi peningkatan yang lebih signifikan menjadi 30,85 persen, dan pada tahun 2021, APK PT mencapai 31,19 persen.

¹⁰ BPS, "Angka Partisipasi Kasar (APK) Perguruan Tinggi (PT) Menurut Provinsi 2018-2022" selengkapanya <https://www.bps.go.id/indikator/28/1443/1/angka-partisipasi-kasar-apk-perguruan-tinggi-pt-menurut-provinsi.html>, diakses pada 12 Mei 2023

Meskipun peningkatan ini menunjukkan adanya upaya meningkatkan partisipasi dalam pendidikan tinggi, angka tersebut masih tergolong rendah jika dibandingkan dengan target nasional sebesar 34,56 persen. Hal ini menunjukkan bahwa masih ada tantangan yang perlu diatasi untuk mencapai tingkat partisipasi yang lebih tinggi di perguruan tinggi di Indonesia.

Dalam konteks ini, penting untuk terus mendorong upaya meningkatkan partisipasi dalam pendidikan tinggi, baik melalui kebijakan pemerintah, program beasiswa, maupun langkah-langkah lainnya. Selain itu, perlu juga dilakukan analisis mendalam tentang faktor-faktor yang mempengaruhi rendahnya partisipasi dalam pendidikan tinggi, termasuk kendala finansial, aksesibilitas geografis, dan kesadaran akan pentingnya pendidikan tinggi bagi kemajuan individu dan negara. Dengan pemahaman yang lebih baik tentang faktor-faktor ini, dapat dirancang strategi yang lebih efektif untuk meningkatkan literasi dan partisipasi dalam pendidikan tinggi di Indonesia.

Tantangan Dan Dampak Meningkatkan Literasi Politik

Perguruan tinggi merupakan lembaga pendidikan tinggi yang memiliki peran sentral dalam pembentukan generasi penerus yang berpendidikan dan berpengetahuan. Namun, dalam konteks politik, perguruan tinggi dihadapkan pada beberapa tantangan yang dapat mempengaruhi peran mereka dalam mengembangkan pemahaman politik yang kritis dan aktif di kalangan mahasiswa.¹¹

Salah satu tantangan utama adalah keterbatasan dalam keterlibatan politik yang dihadapi oleh perguruan tinggi. Sebagai institusi pendidikan, perguruan tinggi diharapkan untuk menjaga netralitas dan independensi mereka. Ini berarti perguruan tinggi harus menghindari berpihak pada salah satu pihak politik atau mengambil sikap yang dapat mempengaruhi pandangan politik mahasiswa. Tantangan ini bisa membatasi perguruan tinggi dalam menyediakan lingkungan yang terbuka dan merangsang untuk diskusi politik yang seimbang dan kritis.

Selain itu, perguruan tinggi juga menghadapi tantangan dalam menghadapi isu-isu politik yang sensitif. Dalam konteks politik yang kompleks dan bergejolak, perguruan tinggi harus berurusan dengan isu-isu yang dapat memicu kontroversi dan polarisasi. Keterbatasan kebebasan berpendapat dan kekhawatiran terhadap stabilitas dapat mempengaruhi ruang diskusi politik di perguruan tinggi. Perguruan tinggi harus mencari keseimbangan antara memfasilitasi diskusi yang terbuka dan menghindari konflik yang merugikan.

Selain itu, perguruan tinggi juga menghadapi tantangan dalam menyediakan pendidikan politik yang memadai bagi mahasiswa. Meskipun literasi politik sangat penting, kurikulum perguruan tinggi sering kali tidak

¹¹ Sumanto, A. S., & Dharma, D. I. (2019). Pengaruh Pendidikan Kewarganegaraan Terhadap Literasi Politik Mahasiswa. *Jurnal Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, 33(1), 28

memadai dalam mencakup aspek politik. Fokus pada disiplin ilmu tertentu atau keahlian khusus mungkin mengabaikan pentingnya pemahaman politik yang holistik. Tantangan ini memerlukan upaya untuk memperluas kurikulum dan menyediakan program yang lebih komprehensif dan terintegrasi dalam hal literasi politik.¹²

Dalam menghadapi tantangan-tantangan ini, perguruan tinggi harus berupaya untuk menjaga kemandirian dan integritas akademik mereka. Perguruan tinggi harus terus mendorong ruang diskusi terbuka, pengembangan pemikiran kritis, dan pendidikan politik yang berimbang dan komprehensif. Penting bagi perguruan tinggi untuk memperkuat peran mereka sebagai agen perubahan sosial dan politik yang positif, sambil menjaga keseimbangan dengan prinsip netralitas dan independensi yang melekat pada fungsi mereka sebagai lembaga pendidikan.

Meningkatkan literasi politik di lembaga pendidikan tinggi di Indonesia juga dihadapkan pada beberapa tantangan. Berikut ini adalah beberapa tantangan yang mungkin dihadapi:

Pertama, minat dan Kesadaran Mahasiswa: Salah satu tantangan utama adalah minat dan kesadaran mahasiswa terhadap pentingnya literasi politik. Beberapa mahasiswa mungkin kurang tertarik atau tidak menyadari pentingnya pemahaman politik dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk meningkatkan minat dan kesadaran mereka melalui pendekatan yang menarik dan relevan.

Kedua, kurikulum yang Terbatas: Kurikulum di lembaga pendidikan tinggi seringkali terbatas dalam mencakup aspek literasi politik. Beberapa program studi mungkin lebih fokus pada bidang akademik atau keahlian tertentu, sehingga aspek politik kurang mendapat perhatian yang cukup. Tantangan ini dapat diatasi dengan memperluas kurikulum untuk memasukkan mata kuliah atau program yang lebih berfokus pada literasi politik.

Ketiga, keterbatasan Sumberdaya: Lembaga pendidikan tinggi mungkin menghadapi keterbatasan sumberdaya dalam menyediakan pelatihan, workshop, atau program literasi politik. Keterbatasan anggaran, fasilitas, dan tenaga pengajar dapat menjadi tantangan dalam menyelenggarakan kegiatan yang efektif. Upaya kolaborasi dengan pihak eksternal atau memanfaatkan teknologi dapat membantu mengatasi tantangan ini.

Keempat, ketidakberimbangan Jenis Kelamin: Terdapat ketidakberimbangan partisipasi antara mahasiswa perempuan dan laki-laki dalam literasi politik. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa partisipasi perempuan dalam hal ini lebih tinggi daripada laki-laki. Penting untuk memastikan bahwa upaya meningkatkan literasi politik mencakup kedua jenis kelamin secara merata.

¹² Saputri, F. R., & Aribowo, Y. (2021). Pendidikan Politik sebagai Upaya Membangun Literasi Politik Pemilih Pemula. *Jurnal Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, 35(1), 3

Kelima, tantangan Teknologi: Sementara teknologi dapat menjadi alat yang efektif untuk meningkatkan literasi politik, tantangan teknologi juga dapat muncul. Mahasiswa mungkin menghadapi kesulitan dalam mengakses teknologi atau tidak memiliki keterampilan teknologi yang memadai untuk memanfaatkannya secara efektif. Penting untuk memastikan bahwa akses teknologi dan pelatihan yang diperlukan tersedia bagi semua mahasiswa.

Keenam, tantangan Politik dan Kebebasan Berpendapat: Tantangan politik dan kebebasan berpendapat juga dapat mempengaruhi upaya meningkatkan literasi politik di lembaga pendidikan tinggi. Adanya pembatasan terhadap kebebasan berpendapat atau polarisasi politik yang tinggi dapat mempengaruhi diskusi terbuka dan kritis di kampus. Penting untuk memastikan bahwa lingkungan pendidikan tinggi mendukung kebebasan akademik dan pluralisme ideologi.

Dengan memahami dan mengatasi tantangan-tantangan ini, lembaga pendidikan tinggi di Indonesia dapat mengembangkan strategi yang efektif untuk meningkatkan literasi politik mahasiswa dan membentuk generasi yang unggul dan kompetitif. Sehingga budaya literasi politik dapat meningkat dan menjadi pendorong serta pendukung demi terwujudnya pemilihan umum yang bermartabat dan berkualitas. Sebab, dampak literasi politik yang tinggi terhadap pemilu yang bermartabat adalah signifikan dan dapat membawa perubahan positif dalam proses pemilihan umum.

Pemilih yang lebih terinformasi: Literasi politik yang baik memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang proses pemilu, partai politik, kandidat, dan isu-isu politik yang relevan. Hal ini membuat pemilih dapat membuat keputusan yang lebih baik dan berdasarkan pengetahuan yang memadai, bukan hanya berdasarkan emosi atau propaganda politik semata. Pemilih yang terinformasi cenderung lebih kritis dan mampu menganalisis dengan baik sebelum memberikan suara mereka.

Partisipasi politik yang lebih aktif: Literasi politik yang tinggi dapat mendorong partisipasi politik yang lebih aktif dari masyarakat. Pemahaman yang baik tentang hak dan kewajiban sebagai warga negara, termasuk hak pilih, dapat mendorong partisipasi dalam pemilu. Pemilih yang melek politik cenderung lebih termotivasi untuk memilih dan terlibat dalam kegiatan politik lainnya, seperti kampanye, debat publik, dan diskusi politik.

Penurunan manipulasi dan penipuan: Literasi politik yang kuat dapat membantu mengurangi manipulasi dan penipuan dalam pemilu. Pemilih yang memiliki pemahaman yang baik tentang strategi politik, retorika, dan propaganda memiliki kemampuan yang lebih tinggi untuk mendeteksi upaya manipulasi atau penipuan yang dilakukan oleh kandidat atau pihak terkait. Mereka dapat melihat melampaui janji-janji kosong dan melihat kebijakan nyata yang ditawarkan oleh kandidat.

Peningkatan akuntabilitas politik: Literasi politik yang baik juga dapat meningkatkan akuntabilitas politik. Pemilih yang melek politik memiliki

pengetahuan tentang hak mereka sebagai pemilih dan harapan mereka terhadap para pemimpin yang terpilih. Mereka cenderung mengawasi tindakan dan keputusan politik yang dibuat oleh para pemimpin yang terpilih, serta meminta pertanggungjawaban jika ada pelanggaran atau penyalahgunaan kekuasaan. Dengan demikian, literasi politik dapat membantu menciptakan sistem politik yang lebih transparan dan akuntabel.

Pemilihan yang lebih bermartabat: Secara keseluruhan, literasi politik yang tinggi berkontribusi pada pemilu yang lebih bermartabat. Pemilih yang terinformasi, aktif, kritis, dan bertanggung jawab cenderung memilih berdasarkan pertimbangan yang lebih rasional dan memilih pemimpin yang berkualitas. Hal ini dapat menghasilkan pemilihan yang lebih adil, berintegritas, dan mewakili suara rakyat secara lebih baik.

Dengan demikian, literasi politik yang tinggi memiliki dampak yang positif terhadap pemilu yang bermartabat dan berkontribusi pada pembangunan demokrasi yang kuat dan berkelanjutan.¹³

PENUTUP

Lembaga pendidikan tinggi memainkan peran penting dalam meningkatkan literasi politik dan membangun pemilu yang bermartabat. Urgensi kepentingan tersebut di antaranya sebagai upaya meningkatkan kesadaran politik, pendidikan nilai dan etika politik dan pengembangan keterampilan analisis. Ada beberapa model yang dapat diterapkan dalam peningkatan literasi politik oleh Pendidikan tinggi, meliputi : Integrasi Kurikulum, Pengembangan Program Studi Spesifik, Pendidikan Politik Aktif, Kolaborasi dengan Komunitas dan Institusi Politik dan Penelitian dan Pengembangan Inovasi. Walaupun dengan begitu ada banyak tantangan yang harus dihadapi oleh Pendidikan tinggi dalam melaksanakan Pendidikan politik, tantangan sebagaimana dimaksud diantaranya : kurikulum yang terbatas, keterbatasan sumberdaya, ketidakberimbangan jenis kelamin dan tantangan teknologi, serta tantangan politik dan kebebasan berpendapat. Dampak literasi politik terhadap pemilu dapat terjadi pada keadaan pemilih yang lebih terinformasi, partisipasi politik yang lebih aktif, penurunan manipulasi dan penipuan, peningkatan akuntabilitas politik, pemilihan yang lebih bermartabat.

DAFTAR PUSTAKA

Gumilar, Setia, Fauzan Ali Rasyid, and Abas Hidayat. (2023). "Political Opposition In Islamic Political Perspective." *Russian Law Journal*

Hahn, C., & Kaghan, W. (2017). *Education for democratic citizenship: A review of research, policy, and practice, 1995-2015.*

¹³ Nurwanti, R. (2020). Literasi Politik dan Peran Media dalam Pemilu di Era Digital. *Jurnal Pendidikan Ilmu Sosial*, 28(2), 121-129

Kahne, J., & Westheimer, J. (2017). What kind of citizen? The politics of educating for democracy. *American Educational Research Journal*, 54(1).

Kurniawan, I. N., & Putri, Y. E. (2020). Literasi Politik dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih di Pemilihan Umum. *Jurnal Pendidikan Ilmu Sosial*, 28(2).

Martens, A., & Wolf, K. D. (2018). Political literacy and the quality of democracy: A cross-national analysis. *Political Studies*, 66(2).

Nurwanti, R. (2020). Literasi Politik dan Peran Media dalam Pemilu di Era Digital. *Jurnal Pendidikan Ilmu Sosial*, 28(2).

Rasyid, Fauzan Ali. "Political will government in prevention of Post-Reform Corruption in Indonesia." *International Journal of Psychosocial Rehabilitation* 24.3 (2020).

Saputri, F. R., & Aribowo, Y. (2021). Pendidikan Politik sebagai Upaya Membangun Literasi Politik Pemilih Pemula. *Jurnal Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, 35(1).

Sumanto, A. S., & Dharma, D. I. (2019). Pengaruh Pendidikan Kewarganegaraan Terhadap Literasi Politik Mahasiswa. *Jurnal Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, 33(1).

Zulhernanda, R., & Suyitno, I. (2019). Pendidikan Politik dan Literasi Politik sebagai Upaya Membangun Partisipasi Pemilih yang Bermartabat. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*, 6(1).